

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini terdapat sejumlah sub bagian yang akan dijelaskan. Masing-masing sub bagian mempunyai hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi sifatnya adalah integratif. Bagian-bagian itu adalah menyangkut latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memasuki era pasca perang dingin yang dimulai pada tahun 1990, AS telah muncul sebagai satu-satunya kekuatan dunia yang melakukan kontrol secara serius terhadap sistem internasional. Kontrol tersebut dilakukan pada hampir semua dimensi kehidupan politik antar negara bangsa. Baik terhadap negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Tidak terkecuali terhadap semenanjung Korea yang dalam konfigurasi politik internasional termasuk sebagai pusat perhatian utama konflik internasional. Ditematkannya

semenanjung Korea dalam pusaran konflik internasional tentu sangat beralasan, karena di wilayah tersebut terdapat potensi konflik yang sangat mencemaskan, yaitu antara Korea Selatan versus Korea Utara. Potensi konflik antara kedua negara tersebut menjadi semakin penting lagi manakala kedua negara yang berkonflik itu ternyata dapat saja mengundang pihak-pihak lain untuk turut serta

terlibat dalam konflik sehingga eskalasinya menjadi tidak menentu. Kemudian konflik antara dua Korea itu juga akan menimbulkan dampak kehancuran yang sangat besar oleh karena Korea Utara memiliki persenjataan nuklir. Intinya, kawasan Asia Timur dapat saja mengalami kehancuran yang meluas tatkala konflik terbuka terjadi diantara dua Korea itu. Oleh sebab itu, AS telah menempatkan semenanjung Korea sebagai salah satu lingkaran terdekat dari politik luar negerinya segera setelah perang dingin usai. Byung-Joo Ahn dalam tulisannya tentang Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur membenarkan hal itu. Kebijakan AS untuk Asia Timur ialah agar tidak ada negara tunggal atau koalisi negara yang menguasai sumberdaya di wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Semenanjung Korea merupakan salah satu wilayah yang dinilai paling genting di wilayah Asia Pasifik. Sumber ketegangan tersebut adalah konfrontasi militer antara Korea Selatan dan Korea Utara yang telah berlangsung sejak perang Korea 1950. Ketegangan itu berasal dari rasa tidak aman kedua belah pihak serta pembangunan kekuatan militer yang terus ditingkatkan disepanjang zona demiliterisasi. Perang Korea memiliki akar yang sangat kompleks yang melibatkan seluruh proses politik baik di dalam negeri maupun di lingkungan luar semenanjung Korea. Secara historis pembagian semenanjung Korea merupakan produk sampingan dari perang dunia kedua dan perang dingin. Keputusan AS dan Uni Soviet untuk menduduki semenanjung Korea pada akhir perang dunia kedua membuka jalan bagi pembagian wilayah ini. Setelah AS memerangi RRC dalam perang Korea, hubungan bipolar antara persekutuan RRC-Uni Soviet dan aliansi

---

<sup>1</sup> Byung-Joo Ahn, "Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur" dalam Robert A. Scalapino, Saichunoo Sato dan Jusuf Wanandi (eds), *Masalah Ketahanan Asia* (CSIS: Jakarta, 1990) h. 166

AS-Jepang menentukan secara mendasar masalah Asia Timur dan Korea. Warisan historis perang dunia kedua dan perang Korea tetap berlaku sejak 1945.

Pasca perang dunia kedua dan pada masa perang dingin, kedua negara, yakni AS dan Uni Soviet saling berebut pengaruh dan turut mewarnai ideologi dan orientasi politik di semenanjung Korea. Akibatnya Korea terbagi menjadi dua negara pada garis lintang 38 derajat yang pada waktu itu masih bersifat sementara. Garis batas itu adalah garis batas militer ketika Jepang menyerah di Korea pada bulan Agustus 1945. Pada akhirnya garis batas tersebut menjadi permanen dan sekaligus menjadi garis demarkasi politik antara dua negara Korea itu. Pada saat perang akan berakhir bulan April 1945 pada Konferensi Yalta disetujui adanya 4 (empat) perwalian (trusteeship) terhadap Korea yaitu AS, US, Inggris, dan Cina sebagai pihak yang ingin menjadi penguasa pemerintahan sementara di Korea. Tetapi oleh karena Jepang menyerah kepada pasukan sekutu dan pada bulan September menyatakan menarik mundur pasukannya dari seluruh medan perang, membuat situasi menjadi berubah. Setelah itu, oleh AS membawa permasalahan itu ke PBB dan pada tahun 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk menyelenggarakan Pemilu. Tetapi Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena hanya diterima di wilayah yang dikuasai oleh AS (Korea Selatan), sementara wilayah utara (Korea Utara) yang dikuasai oleh US menolak resolusi tersebut sehingga tidak terdapat Pemilu di wilayah utara. Walaupun demikian Pemilu tetap dilaksanakan dalam pengawasan PBB di wilayah selatan Korea dan pada 15 Agustus 1948 terbentuklah The Republic of Korea (ROK).

Syng Man Rhee menjadi Presiden terpilih saat itu. Kemudian pada tanggal 9

September 1948 di bagian utara Korea terbentuk pula Democratic People's Republic of Korea (DPRK) yang dipimpin Kim Il Sung. Kedua negara tersebut mengklaim sebagai pemerintahan yang sah.<sup>2</sup>

Setelah kedua negara Korea tersebut terpisah menjadi dua negara, bukan berarti pertikaian antara kedua negara yang masing-masing mewakili dua blok kekuatan dunia yang bersaing telah selesai. Sebab persaingan antara dua negara tersebut sering menimbulkan pertikaian berdarah pada garis lintang 38 derajat yang sebagian besar di lakukan oleh Korea Utara. Akhirnya pada tanggal 25 Juni 1950, tentara Korea Utara yang diorganisir, diperlengkapi dan dihasut oleh US masuk dan menyerang ke arah garis lintang 38 derajat menuju ke wilayah Korea Selatan dengan maksud untuk mempersatukan kedua negara Korea itu dengan cara paksa. Perang ini relatif lebih dahsyat dari perang dunia kedua itu sendiri. Berbagai senjata baru dicobakan dalam berbagai pertempuran, baik senjata ringan maupun senjata berat, termasuk pesawat-pesawat udara model baru yang ikut serta meramaikan medan perang itu. Dari segi korban, perang Korea adalah perang yang memakan korban terbanyak kelima di dalam sejarah dunia. Karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan perang Korea termasuk tragedi internasional. Jutaan orang terbunuh dalam perang Korea sebagai akibat konflik ideologi dan kepentingan nasional antara kedua negara. Sebuah perang yang sesungguhnya merefleksikan perang antara AS dan US, karena pada masa itu adalah puncak dari persaingan kedua negara besar yang berbeda blok era perang dingin. Aksi tersebut membuat Presiden Harry Truman mengerahkan kekuatan militer AS ke Korea

---

<sup>2</sup> <http://www.nationbynation.com/Korea/history1.html>.

Selatan walaupun tanpa banyak persiapan.<sup>3</sup> Dan pada saat yang hampir bersamaan PBB meminta negara-negara lain di dunia untuk ikut serta mengerahkan pasukannya ke wilayah Korea Selatan dalam menghadapi agresi Korea Utara. Himbauan PBB tersebut secara langsung ditanggapi oleh 15 negara yang mengirimkan tentaranya dan 5 negara lainnya mengirimkan bahan obat-obatan untuk keperluan perang.<sup>4</sup> Pengerahan pasukan ke wilayah Korea Selatan itu merupakan pertama kali dalam sejarah dimana PBB mengirimkan pasukan multinasional ke daerah konflik untuk menghentikan pertikaian dan mencegah agresi komunis. Atas permintaan AS ke PBB maka disahkanlah pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Mac Arthur sebagai komando pasukan multinasional di bawah mandat PBB.<sup>5</sup> Dalam pertempuran tersebut, Cina sebagai sekutu Korea Utara tidak tinggal diam. Negara ini memberikan bantuan tentara dan peralatan militer kepada Korea Utara untuk melawan tentara multinasional. Usaha Cina tidak sisa-sisa dan negara itu berhasil memukul mundur pasukan multinasional PBB. Pasukan PBB itu mundur dengan kekuatan dan konsentrasi yang terpecah dan secara moral kalah dalam pertempuran menuju arah utara Korea Selatan. Setelah itu pasukan multinasional di bawah komandan pasukan yang baru, Jenderal Ridgely berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara pada musim semi tahun 1951.<sup>6</sup> Akhirnya pasukan dari berbagai negara yang diperlengkapi dengan persenjataan yang modern dan terdiri dari beberapa angkatan di militer seperti AL dan AD itu dapat memukul mundur pasukan Korea Utara dari wilayah

<sup>3</sup> <http://www.va.gov/visns/visn03/kids/koreanwar.htm>

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> <http://www.usa.gov/visns/visn03/kids/koreanwar.htm>



Korea Selatan pada bulan Juli 1953. Kemudian perang pun berakhir dengan mundurnya pasukan Korea Utara dari wilayah Korea Selatan. Setelah perang berakhir, bukan berarti berakhir pula permusuhan. Untuk menegaskan, dibuat lagi batas-batas pemisah wilayah yang dihasilkan dari adanya gencatan senjata selebar 5 mil yang penuh dengan wilayah yang berbukit-bukit memanjang pada posisi 38 derajat. Daerah ini berfungsi sebagai *buffer zone* (daerah penyangga) dan harus bebas dari militer dan peralatan berat militer seperti tank dan artileri lainnya. Kemudian di dalam garis tersebut ada garis demarkasi militer (*military demarcation line*) yang berarti apabila ada yang melewati garis tersebut akan dieksekusi mati.<sup>7</sup> Akibat sampingan dari tiga tahun perang Korea itu terlihat timbulnya ketegangan antara AS dan US dimana Korea Selatan dan Korea Utara menjadi pion terdepan dalam petempuran kedua negara adikuasa itu yang masing-masing mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mengembangkan nasionalisme Korea. Dekade berikutnya Korea Utara mengembangkan dinasti keturunan yang belum pernah ada dalam sejarah dunia komunis yang dianggap negara paling ketat di dunia. Hanya orang-orang yang berasal dari keturunan Kim Il Sung lah yang berhak menjadi pemimpin atau presiden di Korea Utara. Sebaliknya Korea Selatan menikmati perkembangan ekonomi yang luar biasa sehingga menjadi negara industri baru yang pendapatan nasionalnya meningkat 200 kali lipat dalam waktu 30 tahun.<sup>8</sup> Pengalaman agresi militer Korea Utara yang pada akhirnya memicu terjadinya perang Korea selama tiga tahun itu telah membuat AS sangat berhati-

---

<sup>7</sup>National Geography Magazine, July 2003.

<sup>8</sup>Lee Chang-Kun "Unleashed Demons of the Korean Peninsula" Korea Economic Monthly, 2003

hati terhadap isu semenanjung Korea. Sikap hati-hati dari AS ini memang sangat beralasan, karena pasukan multinasional bentukan PBB yang dahulu terlibat dalam perang itu banyak mengalami korban jiwa ditambah dengan korban jiwa dari pihak Korea Selatan. Masa-masa berikutnya, wilayah Korea telah menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri AS dengan poin penting bahwa AS tidak akan mengulangi sejarah dalam mana banyak korban jiwa dari pihaknya. Itulah sebabnya AS mengubah kebijakan politik luar negerinya terhadap semenanjung Korea dari yang sebelumnya mengandalkan strategi militer konvensional untuk menghadapi kemungkinan agresi dari Korea Utara kepada strategi militer non-konvensional yang lebih mengandalkan senjata jarak jauh. Sebagai konsekwensinya sekutu AS di sekitar wilayah konflik dijadikan titik perantara serangan dan itu jatuh pada Korea Selatan sendiri dan Jepang yang memang menjadi sekutu utama AS di Asia Timur. Sementara itu strategi lain juga diterapkan, yaitu mencoba melemahkan Korea Utara melalui negosiasi-negosiasi multilateral. Upaya melemahkan Korea Utara ini dilakukan dengan cara mengisolasi negara itu lewat embargo atau sanksi-sanksi internasional. Cara ini sejak lama telah ditempuh AS, tetapi cara ini pun belum menghasilkan sesuatu yang berdampak pada terciptanya solusi, melainkan justru sebaliknya dalam mana Korea Utara mengembangkan jenis persenjataan baru. Pada akhirnya wilayah semenanjung Korea adalah sebuah wilayah yang sangat rawan konflik antar bersenjata dengan penggunaan sistem persenjataan militer yang sangat mematikan. Tidak mengherankan bila kemudian wilayah tersebut merupakan

sebuah wilayah yang sarat dengan perlombaan senjata (*arms race*) dalam peta keamanan internasional.

Perkembangan internasional berikutnya yang patut menjadi perhatian dalam kerangka Korea Utara adalah ketika usai perang dingin, tepatnya pada awal dimulainya era pasca perang dingin. Pada tahun 1990 dan 1992, Moskow dan Beijing menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Korea Selatan. Peristiwa ini jelas memukul Korea Utara. Dua negara besar tersebut yang selama ini telah menjadi sandaran Korea Utara, tidak lagi berhubungan erat dengan Pyongyang dan karena itu pula Korea Utara terkucilkan baik secara politiki maupun ekonomi. Tetapi mengetahui situasi yang demikian itu, Korea Utara justru memutuskan untuk menempuh jalan sendiri dengan mengembangkan rudal dan senjata nuklir sebagai usaha untuk mempertahankan kelangsungan negara dan rejimnya. Pada masa pemerintahan Kim Jong Il tahun 1994, yang merupakan putera Kim Il Sung, terdapat kebijakan militer yang menyatakan bahwa setiap warga negara adalah pejuang dan setiap tempat adalah benteng. Memodernisasi seluruh angkatan bersenjata, mempersenjatai seluruh rakyat dan menjadikan setiap tempat adalah benteng di seluruh negeri, merupakan kebijakan mutlak yang tidak dapat ditawar dalam konstitusi Korea.

Korea Utara sangat menyadari bahwa hanya dengan membangun kemandirianlah negara itu bisa melangsungkan hidupnya. Ajaran-ajaran Kim Il Sung ini dijadikan sebagai basis kemandirian Korea Utara, hasilnya saat ini Korea Utara telah muncul sebagai negara kuat dalam bidang militer. Negara ini juga mempunyai sistem pertahanan militer berbasis senjata nuklir yang sangat

membahayakan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari serangkaian uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara setiap tahun sejak 1994. Kondisi di semenanjung Korea, justru bukan menunjukkan terciptanya stabilitas pasca perang dingin, melainkan sebaliknya yaitu pada tingkat yang mencemaskan. Oleh karena itu semenanjung Korea sesungguhnya adalah sisa produk perang dingin yang belum menunjukkan perubahan-perubahan yang berarti. Wilayah itu tetap saja mencemaskan secara politik dan keamanan. Sementara itu kebijakan AS terhadap Korea ialah menghindari perang semenanjung dengan memenuhi komitmen pertahanan yang disanggupi sejak tahun 1953 dan mempertahankan keseimbangan kekuatan dengan Uni Soviet di Asia Timur. Korea Selatan adalah satu-satunya negara di Asia yang memiliki personil militer angkatan darat dari AS dalam rangka mempertahankan keseimbangan itu.<sup>9</sup> AS mengakui pentingnya menempatkan personil militer yang ditempatkan di Seoul dan diantara zona demiliterisasi Korea dengan menggunakan peralatan militer yang canggih agar dapat menjaga keamanan Jepang dan Korea Selatan sendiri. Penempatan personil militer diperuntukkan bagi penangkalan sewaktu-waktu serangan dari Korea Utara. AS sangat berkepentingan menempatkan pasukannya di Korea Selatan yang mempunyai peran sebagai berikut ; *Pertama*, pasukan ini untuk menahan serangan dari utara dan memenuhi komitmen pertahanan AS terhadap Korea Selatan. *Kedua*, peranan surveillance (pengawasan) yang hanya aman jika dilakukan dengan mengerahkan pasukan darat. Dalam kekuatan keseimbangan di Korea, agresor sangat potensial berada dalam kedudukan menguntungkan, pihak

yang mempertahankan harus sedini mungkin mengetahui langkah-langkah pasukan penyerang. Kemampuan ini belum dimiliki Korea Selatan. *Ketiga*, kehadiran militer AS merupakan simbol yang dapat dipercaya bahwa AS mempunyai tekad untuk tetap mempertahankan kedudukannya di Asia dan memainkan peran mengimbangi kekuatan Uni Soviet di wilayah tersebut. Berakhirnya perang dingin, tetap saja tidak merubah pendirian AS atas semenanjung Korea, meskipun dalam berbagai hal terdapat perubahan pada tingkat persepsi. Kehadiran pasukan AS di Korea tetap dipertahankan dan kehadiran pasukannya ini dapat dipandang sebagai simbol komitmennya terhadap dunia yang bebas dari ancaman dan menjadi semakin penting dari pada sekedar menjaga status quo. Dalam kondisi ini kehadiran militer AS di Korea Selatan mempunyai dua fungsi bagi pertahanan Korea Selatan, yaitu sebagai deterrence (penangkalan) bagi kemungkinan ancaman Korea Utara dan jika fungsi ini gagal maka pasukan AS akan menghadapinya guna menghalau serangan tersebut. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penempatan pasukan AS di garis depan antara Seoul dan zona demiliterisasi menunjukkan dukungan AS terhadap Korea Selatan dalam kemungkinan terjadinya perang besar. Kehadiran militer AS ini dapat dijadikan sebagai basis efisien dalam perang kilat jika utara benar-benar menyerang wilayah selatan.<sup>10</sup>

Selama empat dekade kerangka struktural kerjasama keamanan kedua negara tidak mengalami perubahan berarti. Komitmen AS untuk mempertahankan Korea Selatan tidak berkurang meskipun sepanjang perjalanannya sering muncul

---

<sup>10</sup>Kim Hak Joon, "US-South Korean Security Relations; A Challenging Partnership", *The Korean*

ketegangan-ketegangan diantara kedua pemerintahan.<sup>11</sup> Menjelang dasawarsa tahun 1990-an ada beberapa tanda yang menunjukkan adanya perubahan dalam aliansi AS-Korea Selatan. Dengan situasi lingkungan internasional yang lebih damai dan semakin berkembangnya kemampuan Korea Selatan, telah memunculkan kritikan-kritikan dari para ahli pertahanan keamanan AS yang mendesak Washington untuk segera menarik seluruh pasukan AS di Korea Selatan dan keterlibatan AS di semenanjung Korea hendaknya segera diakhiri. Sebagai contoh adalah kritik yang dikemukakan oleh Doug Bandow, seorang ahli strategi militer pada Institute Washington menyatakan bahwa, jaminan pertahanan keamanan AS harus segera dieliminasi dari wilayah Korea Selatan dan Semenanjung Korea, divisi infantri harus dikurang secara bertahap setidaknya selama dua tahun, kemudian divisi angkatan udara dan unit lain menyusul dalam waktu tiga tahun, sementara perjanjian pertahanan dengan Korea Selatan juga harus direvisi lagi tanpa harus membebani AS.<sup>12</sup>

Kebijakan pemerintah AS terhadap semenanjung Korea tidak pernah berubah secara drastis. Beberapa waktu setelah terjadinya peristiwa serangan teroris yang menghancurkan gedung World Trade Center di New York pada 11 September 2001 kebijakan luar negeri AS ditandai dengan "perang terhadap teror". Pasca peristiwa 11 September perhatian AS memang lebih terkonsentrasi ke wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, mengingat sebagian pelaku penyerangan diindikasikan sebagai warga dari negara-negara Arab dan diduga terkait dengan

---

<sup>11</sup> Kim Woo Sang and Kwangliai, "South Korean Alliances and Deterrence Strategy toward North Korea", *Journal of East Asian Affairs*, Vol. V, No. 2, Autumn 1991, h. 276.

<sup>12</sup> Pernyataan Doug Bandow ini dapat dilihat dalam Lee Chung Min, *The Emerging Strategic Balance in Northeast Asia* (Center for Peace and Unification: Seoul, 1989) h. 233

kelompok Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden yang bermarkas di Afghanistan. Namun pada perkembangannya kebijakan luar negeri AS yang dijangkiti paranoia itu mulai bersikap waspada terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengannya. Dalam hal ini, walaupun Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Il tidak terlibat dalam peristiwa 11 September 2001, kebijakan luar negeri AS menjadi keras terhadap Korea Utara yang telah dianggap menjadi ancaman bagi AS. Pada 29 Januari 2002, Presiden Bush di hadapan Kongres AS mengumumkan bahwa Korea Utara menjadi bagian dari poros kejahatan (axis of evil) bersama dengan Iran dan Irak. Bush menegaskan bahwa negara-negara tersebut "sedang tumbuh dan berbahaya" dan bahwa AS akan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional AS. Bush menyatakan bahwa Korea Utara adalah negara yang sedang mengejar senjata pemusnah massal dan mendukung terorisme. Korea Utara memperingatkan bahwa statement itu "sedikitnya mengumumkan perang".<sup>13</sup>

Kebijakan luar negeri AS terhadap Korea Utara itu tidak terlepas dari usaha negara komunis tersebut untuk memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Menurut laporan *Asia Report* penguasaan Korea Utara terhadap peluru kendali dan senjata nuklir telah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Diperkirakan Korea Utara telah menempatkan sekitar 600 peluru kendali jarak pendek Scud dengan bermacam variannya yang dapat menghujani wilayah Korea Selatan dan sejumlah 320 peluru kendali jarak menengah Nodong yang mampu menjangkau Jepang. Sedangkan peluru kendali dengan jelajah jarak jauh yang

---

<sup>13</sup> <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kim/etc/cron.html>

berpotensi menyerang benua Amerika sedang dalam tahap pengembangan. Diperkirakan pula sebanyak enam hingga 12 rudal itu dilengkapi oleh hulu ledak nuklir.<sup>14</sup> Aktivitas pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara juga tidak pernah surut. Selama bulan Maret 2003, misalnya, Korea Utara melakukan uji coba dengan menembakkan dua misil jarak pendek ke laut Jepang. Selanjutnya pada Oktober 2002 CIA mengungkapkan bahwa Korea Utara sedang mengoperasikan program pengayaan uraniumnya secara rahasia. Di tahun yang sama juga terdapat insiden pencegahan kapal Sosan milik Korea Utara yang mengangkut paket rudal Scud ke Yaman oleh Angkatan Laut Spanyol.

Ambisi Korea Utara untuk mengembangkan senjata pemusnah massal ini menonjol di bawah kepemimpinan Kim Jong Il pada pertengahan tahun 1990-an. Sebelumnya Korea Utara pada tahun 80-an hanya diketahui memiliki keunggulan yang mencolok dalam kekuatan militer konvensional dibandingkan Korea Selatan. Namun belakangan setelah berakhir era perang dingin kekuatan militer konvensional Korea Selatan semakin dapat mengimbangi.

Pada saat Korea Utara dilanda kelaparan tahun 1990-an, pemimpin negara komunis tersebut semakin meningkatkan ketergantungannya kepada militer dalam mengelola pemerintahan. Ketika itu dikenal kebijakan "militer yang utama" bersamaan dengan tampilnya pemerintahan Kim Jong Il mencengkeram kekuasaan pada 1998. Sejak memburuknya perekonomian Korea Utara yang membuat negara tersebut tidak dapat bersaing dengan negara-negara tetangganya, Pyongyang mendapat dorongan yang kuat untuk mempertahankan dan

---

<sup>14</sup>"North Korea's Nuclear and Missile Programs" *Asia Report* No 168, 18 June 2009

mengembangkan kemampuannya.<sup>15</sup> Berkat kemampuannya dalam mengembangkan peluru kendali dan nuklir Korea Utara pun mendapatkan pemasukan yang cukup besar dari hasil penjualan peluru kendali, komponen, serta teknologinya ke sejumlah negara.

Menurut laporan, Pyongyang juga menjalin kerjasama dengan Iran untuk mengembangkan peluru kendali jarak jauh beserta kendaraan peluncurnya. Karena itu program peluru kendali dan nuklir bagi Korea Utara menjadi sangat penting sebagai sumber pemasukan uang di samping sebagai simbol dari kekuatan negaranya yang dieksploitasi oleh kepemimpinan Pyongyang demi kontrol politik ke dalam. Agenda kepemilikan senjata nuklir Korea Utara telah menjadi bagian tersendiri dalam kebijakan AS terhadap semenanjung Korea.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kebijakan luar negeri AS terhadap kepemilikan senjata nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan George W. Bush ?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penulis menggunakan teori politik luar negeri yang dirumuskan oleh beberapa ahli. Sangat menarik untuk dicatat bahwa dalam berbagai literatur dan diskursus mengenai teori hubungan

---

<sup>15</sup> "North Korea's Nuclear and Missile Program," Asia Report No.168, 18 June 2000.

internasional, politik luar negeri merupakan salah satu isu yang banyak memperoleh kajian dan sorotan. Meski banyak definisi yang ditawarkan. Dalam bukunya *Understanding Internasional Relation*, Chris Brown memberikan pemahaman secara sederhana mengenai politik luar negeri. Menurut Brown politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar.<sup>16</sup> Pengertian sederhana tentang politik luar negeri ini dapat juga di lihat dari Christopher Hill dalam bukunya *The Changing Politics of Foreign Policy*. Menurut Hill, politik luar negeri adalah serangkaian strategi nasional yang dihadapkan kepada lingkungan internasional demi mewujudkan keinginan-keinginan nasional sebuah negara.<sup>17</sup>

Kemudian untuk memahami perilaku politik luar negeri sebuah negara, William D. Coplin mengindikasikan ada 4 (empat) determinan politik luar negeri, *Pertama*, adalah konteks internasional. Dalam hal ini situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana negara itu akan berperilaku. Dalam kaitan ini Coplin mengatakan bahwa ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu; geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi geografis yang didudukinya dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, serta hubungan ekonomi

---

<sup>16</sup> Pendapat Chris Brown ini dikutip dari buku Ganewati Wuryandari, "Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia; Sebuah catatan yang terlewat", dalam Ganewati Wuryandari (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik*, (Pustaka Pelajar Yogyakarta dan P2P LIPI Jakarta, 2008), h. 14-15.

<sup>17</sup> Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, (Palgrave: London, 2003), h. 1

dan politik antara negara itu dengan negara-negara lainnya. Kondisi geografis merupakan sesuatu yang konstan keberadaannya. Faktor *kedua* yang menjadi determinan dalam politik luar negeri adalah perilaku para pengambil keputusan. Dalam hal ini mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga di suatu pemerintahan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan individu-individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri. Perilaku para pengambil keputusan ini sangat tergantung kepada kelompok yang sedang berkuasa. Pada masa pemerintahan Bush misalnya, perilaku politik luar negerinya adalah konfrontasionis, sehingga tidak mengherankan bila kemudian bermunculan kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang berlawanan dengan kehendak negara yang dituju, seperti kebijakan embargo ekonomi terhadap Korea Utara serta dukungan AS terhadap resolusi DK PBB atas penghapusan dan pemeriksaan senjata nuklir Korea Utara. Kemudian determinan *ketiga*, adalah kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain.

*Keempat*, determinan terakhir yang mempengaruhi politik luar negeri adalah politik dalam negeri. Melalui perspektif ini yang ingin dilihat adalah sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional. Situasi politik yang terjadi dalam negeri akan mempengaruhi negara tersebut dalam penentuan dan pelaksanaan politik



Dari keempat determinan penting yang mempengaruhi politik luar negeri menurut William D. Coplin tersebut, faktor pertama yakni konteks internasional dan faktor yang ke empat, yaitu politik dalam negeri adalah determinan utama yang dinilai sesuai dengan kerangka berpikir penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, dalam penulisan ini dibutuhkan konsep diplomasi. Penggunaan konsep diplomasi menjadi penting tatkala politik luar negeri yang merupakan serangkaian perencanaan dan strategi nasional tadi diimplementasikan pada tingkat realita. Politik luar negeri dijadikan sebagai garis besar kebijakan sedangkan diplomasi adalah instrumen yang melaksanakan atau mengoperasionalkan serangkaian strategi atau perencanaan-perencanaan nasional tadi. Menurut G.R. Berridge dalam bukunya *Diplomacy; Theory and Practice*, diplomasi adalah tingkah laku dalam hubungan internasional yang dilaksanakan melalui negosiasi dengan cara penggunaan kekuatan militer, propaganda maupun penggunaan hukum dan norma-norma internasional.<sup>19</sup> Sedangkan S.L Roy dalam bukunya *Diplomasi* menyatakan diplomasi yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antarnegara adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, maka diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.<sup>20</sup> Dalam kaitan dengan penulisan ini, AS dalam menjalankan politik luar negerinya menggunakan cara-cara tersebut.. Cara-cara

---

<sup>19</sup> G.R. Berridge, *Diplomacy; Theory and Practice* (Prentice Hall, London-New York, 1995), h. 1n

<sup>20</sup> S.L. Roy, *Diplomasi* (Pustaka Jaya, Jakarta, 1995), h. 5

tersebut digunakan oleh AS dengan tujuan untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya.

#### **D. Hipotesa**

AS mempunyai kebijakan luar negeri yang sangat tegas menentang kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Kebijakan AS yang menentang keras kepemilikan senjata nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan George W. Bush tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya AS menekan Korea Utara dengan cara :

1. Menggunakan instrumen multilateral seperti PBB dalam rangka menekan Korea Utara agar negara tersebut melucuti dan menghentikan dengan segera pembangunan senjata nuklirnya.
2. Tetap menempatkan sejumlah personil militer AS di Korea Selatan dan di zona demiliterisasi dalam rangka menangkal serangan dari Korea Utara terhadap Korea Selatan.
3. Membangun aliansi militer dengan Korea Selatan dan Jepang dalam rangka membendung kemungkinan serangan militer dari Korea Utara.
4. Mendesak Korea Utara agar tetap melaksanakan dialog inter-Korea dan dialog antara Korea Utara dengan sejumlah negara di kawasan Asia Timur.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan fenomena yang terjadi, yaitu adanya sikap AS yang dengan tegas menolak keras kepemilikan senjata nuklir Korea Utara.
2. Menjelaskan arah dan karakter politik luar negeri AS yang dengan tegas menolak keras kepemilikan senjata nuklir Korea Utara.
3. Penelitian ini dimaksudkan juga untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan penulis serta menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan.
4. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu ilmu hubungan internasional.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Studi yang dilakukan penulis atas judul kebijakan luar negeri AS terhadap kepemilikan senjata nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan George W. Bush ini dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2006. Dalam rentang waktu ini, AS mempunyai garis kebijakan luar negeri yang sangat tidak lazim dilakukan, terutama satu dekade sebelumnya. Ditandai dengan adanya superioritas atas sistem internasional. Penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplorasi data pada tahun-tahun sebelumnya yang dianggap relevan, tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran data penelitian.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari

buku-buku literatur, jurnal ilmiah, surat kabar, dokumen pendukung lainnya serta sumber dari website yang dianggap perlu guna mendukung kelengkapan data penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II adalah menjelaskan tentang gambaran umum politik luar negeri AS yang antara lain berisikan tentang prinsip dasar politik luar negeri AS, strategi politik luar negeri AS, proses pengambilan keputusan dalam politik luar negeri AS dan tinjauan ringkas mengenai posisi semenanjung Korea dalam politik luar negeri AS, termasuk isu kepemilikan senjata nuklir Korea Utara.

Bab III adalah menjelaskan tentang posisi dan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Pada bab ini penulis akan menjelaskan juga hal-hal yang terkait dengan Korea Utara sebagai ancaman potensial bagi Korea Selatan sekaligus juga bagi kawasan Asia Timur.

Bab IV menjelaskan bagaimana pendekatan AS dalam menghadapi masalah kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara dengan menggunakan instrumen diplomasi yaitu melalui negosiasi dengan cara penggunaan kekuatan militer, propaganda, maupun penggunaan hukum dan norma norma internasional.

Bab V merupakan kesimpulan dari penulisan ini